



Menekan Laju Pertambahan Kasus COVID-19 dengan Mengendalikan Pergerakan Masyarakat dan Meningkatkan Perilaku 3M

Peneliti Tim Sinergi Mahadata Tanggap COVID-19 Universitas Indonesia

Pelindung

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D
Rektor Universitas Indonesia

Pengarah

Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi

Penanggung Jawab Kegiatan

Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., M.U.P., Ph.D
Direktorat Inovasi dan Science Techno Park

Tim Peneliti

Adila Alfa Krisnadhi, S.Kom., M.Sc., Ph.D.
Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., MUP., Ph.D.
dr. Aly Lamuri, M.Sc.
Ardiansyah, S.Si.
Arierta Pujitresnani, S.Si., M.Si.
Arya Ananda Indrajaya Lukmana
Dicky C. Pelupessy, Ph.D.
Dr. Eko Sakapurnama, MBA
Faris Zulkarnain, M.T.
dr. Gina Anindyajati, SpKJ
Dr. dr Hervita Diatri, SpKJ(K)
dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D.
Prasandhya Astagiri Yusuf, S.Si., M.T., Ph.D.
Laras Sekarasih, Ph.D.
Muhammad N. Farid
Nurrokhmah Rizqihandari, M.Si.
Satria Indratmoko, M.Sc.

Tim Perumus

dr. Anindya P Susanto, B.Eng., M.M.
Dr. Bagus Takwin, M.Hum.
Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG(K), MPH
dr Damar P Susilaradeya, MRes, PhD
dr. Diashati Mardiasmo, BMedSc, MRes
Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H.
dr. Iwan Ariawan, MSPH
Jarot Mulyo Semedi, M.Sc.
Muhammad Halley Yudhistira, Ph.D.

Ringkasan Eksekutif

Dengan diperkenalkannya konsep “*new normal*” dan dibukanya berbagai sektor, masyarakat kembali beraktivitas dan pergerakan masyarakat meningkat baik di dalam kota maupun antar kota. Namun pergerakan yang meningkat ini tidak diikuti dengan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) serta upaya pelaksanaan TLI (Tes-Lacak-Isolasi) yang adekuat. Akibatnya, terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia dengan *positivity rate* nasional mencapai 15,4%. Penularan kasus COVID-19 yang semakin luas menyebabkan tingginya angka kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas) yang membawa dampak jangka pendek maupun panjang. Peningkatan kasus COVID-19 berimplikasi terhadap ekonomi terlebih jika berkepanjangan, sehingga penting untuk segera diatasi.

Dalam *policy brief* ini isu-isu yang diangkat oleh Tim Sinergi Mahadata UI berhubungan dengan:

1. Peningkatan kasus COVID-19 berkaitan dengan pergerakan masyarakat yang tinggi,
2. Data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan bervariasi, tidak terkoneksi, terintegrasi, dan tersinkronisasi, sehingga tidak mewakili kondisi sesungguhnya,
3. Pelaksanaan 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) dan TLI (Tes-Lacak-Isolasi) belum konsisten,
4. Peningkatan kasus COVID-19 berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi (ketahanan pangan dan ketenagakerjaan), dan,

5. Desain kebijakan produk hukum pusat dan daerah belum sinergis untuk berhasil menekan peningkatan kasus COVID-19.

Adapun rekomendasi yang kami berikan adalah:

1. Meningkatkan perilaku di rumah saja (*stay at home*) dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan 3M,
2. Membatasi aktivitas masyarakat dan pergerakan ke luar kota,
3. Membangun sistem informasi data dan pusat data yang terkoneksi, terintegrasi, dan tersinkronisasi,
4. Mengefektifkan Tes-Lacak-Isolasi,
5. Akselerasi efektivitas penyaluran stimulus fiskal dan perlindungan sosial, dan
6. *Mind-mapping* regulasi untuk mendesain kebijakan pusat dan daerah yang sinergis dan kolaboratif serta perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Untuk mengendalikan pergerakan masyarakat dan menurunkan laju pertumbuhan kasus COVID-19 diperlukan sinergi dari berbagai pihak. Pembuatan kebijakan berbasis data yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan *mind-mapping* regulasi untuk mendesain kebijakan pusat-daerah, menjadi kunci untuk menurunkan laju pertumbuhan kasus COVID-19.

Latar Belakang

Pada akhir bulan Mei 2020, Pemerintah Indonesia memperkenalkan konsep "*new normal*" yang beralih menjadi "adaptasi kebiasaan baru" sebagai tatanan untuk beradaptasi hidup damai dengan COVID-19. Dengan dibukanya berbagai sektor, masyarakat kembali beraktivitas dan pergerakan masyarakat meningkat. Pergerakan masyarakat meningkat dalam (*intra-city*) maupun antar-kota (*inter-city*). Dengan tingginya peningkatan pergerakan ini, data harian menunjukkan lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia dengan positivity rate nasional dan DKI Jakarta masing-masing sebesar 15,4% dan 14,1% jauh di atas ambang batas aman 5% oleh WHO.

Peningkatan kasus dapat dikaitkan dengan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) yang disebabkan oleh rendahnya persepsi risiko masyarakat dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya diimplementasikan. Masyarakat akan terus melanggar protokol kesehatan 3M apabila tidak dikenakan sanksi yang bersifat 'jera'. Cakupan pelaksanaan 3M yang tinggi dan konsisten merupakan upaya penting dalam penekanan transmisi virus COVID-19 karena memiliki efek protektif yang setara dengan PSBB. Selain itu, pengerjaan TLI (Tes-Lacak-Isolasi) belum berjalan dengan baik dan benar, mengingat kurangnya tenaga kesehatan dalam segi jumlah maupun kapasitas untuk melakukan pelacakan, kurangnya pemantauan, dan terdapat tracing delay dikarenakan hasil PCR memakan waktu 2-7 hari.

Dampak tingginya kasus COVID-19 adalah tingginya morbiditas dan mortalitas masyarakat termasuk petugas kesehatan, terus meningkatnya persentase penggunaan tempat tidur di rumah sakit untuk kasus COVID-19, dan penurunan kinerja ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32%. Perlambatan ekonomi ini sangat mungkin merupakan implikasi dari belum terkendalinya kasus COVID-19. Dampak lebih lanjut dari perlambatan ekonomi di Indonesia adalah penurunan ketahanan pangan dan tingginya angka pengangguran. Menanggapi situasi ini, Tim Sinergi Mahadata Tanggap COVID-19 Universitas Indonesia mengangkat isu-isu terkait dan mengajukan rekomendasi yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam pembuatan kebijakan untuk menindaklanjuti krisis kesehatan-ekonomi akibat pandemi COVID-19.

REKOMENDASI

MENINGKATKAN PERILAKU DI RUMAH SAJA (STAY AT HOME) DAN MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN 3M

Komite Penanganan COVID-19 dan Kepala Daerah di provinsi dan kabupaten/kota perlu menggalakkan dan mendorong perilaku di rumah saja (*stay at home*) kecuali benar-benar diperlukan, tanpa mengabaikan aspek ekonomi, psikologi, dan sosial. Diperlukan pengaturan untuk mendorong perilaku ini, pada fasilitas umum, transportasi umum, regulasi perkantoran, tempat hiburan, dan kegiatan pendidikan, serta penjaminan ketersediaan jaringan komunikasi dan internet. Dukungan psikososial dan komunikasi risiko perlu diberikan bagi masyarakat untuk dapat menjalankan perilaku di rumah saja.

Komite Penanganan COVID-19 melalui para pemimpin perlu melakukan komunikasi risiko yang baik oleh dengan tetap **menjaga otoritas ilmiah pada ilmuwan**. Pada masyarakat yang heterogen, pesan kunci dalam mengurangi bias optimisme dan mengubah persepsi hambatan dalam menjalankan protokol kesehatan adalah bahwa **siapapun bisa terkena COVID-19** dan mematuhi protokol kesehatan lebih nyaman dari pada sakit karena COVID-19. Diperlukan kampanye bukti sosial, *role model*, dan teladan yang konsisten dari pejabat dan tokoh publik, serta pemanfaatan komunitas.

Untuk memantau kepatuhan masyarakat dalam melakukan 3M diperlukan cara yang terstandardisasi yang salah satunya dapat dilakukan dengan pemantauan yang dilaporkan secara berkala oleh pemerintah daerah. Cara lain adalah dengan melakukan pemantauan berbasis CCTV dengan *artificial intelligence*.



REKOMENDASI

MEMBATASI AKTIVITAS MASYARAKAT DAN PERGERAKAN KE LUAR KOTA

Komite Penanganan COVID-19 dan Kementerian Perhubungan perlu membatasi aktivitas masyarakat dan melakukan pembatasan/pengetatan perjalanan dinas dan bepergian bagi pekerja untuk mengurangi laju *imported case* COVID-19 antar wilayah. Pertemuan secara daring dapat dioptimalkan sebagai pengganti perjalanan dinas sehingga anggaran perjalanan dinas dapat dialokasikan pada bidang lain yang lebih esensial.

Pengendalian pergerakan dan menekan penyebaran infeksi COVID-19 ke sentra-sentra pertanian yang umumnya berada di pedesaan penting untuk diperhatikan dan direncanakan dengan segera. Hal ini untuk mengantisipasi penurunan ketersediaan pangan jangka menengah dan panjang akibat dari penurunan impor pangan dari negara-negara penghasil utama yang juga tengah mengalami gangguan produksi akibat COVID-19.



REKOMENDASI

MEMBANGUN SISTEM INFORMASI DAN PUSAT DATA YANG TERKONEKSI, TERINTEGRASI, DAN TERSINKRONISASI

Komite Penanganan COVID-19 perlu segera membangun sistem informasi data dan pusat data yang terkoneksi, terintegrasi, dan tersinkronisasi sebagai dasar akurat untuk membuat kebijakan yang tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Diperlukan unifikasi variabel data yang harus dikumpulkan dengan cara pengumpulan yang seragam. Transparansi data diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kepatuhan. Penyediaan dataset COVID-19 secara terbuka (*open-access*) akan mendorong kolaborasi masyarakat dan mempercepat analisis serta penyelesaian masalah COVID-19. Perlu didirikannya **badan otoritas data kesehatan Indonesia** yang mengatur penyimpanan, kepemilikan, kerahasiaan, akses, lalu lintas dan sharing data kesehatan di negara kita.



REKOMENDASI

MENGEFEKTIFKAN TES-LACAK-ISOLASI

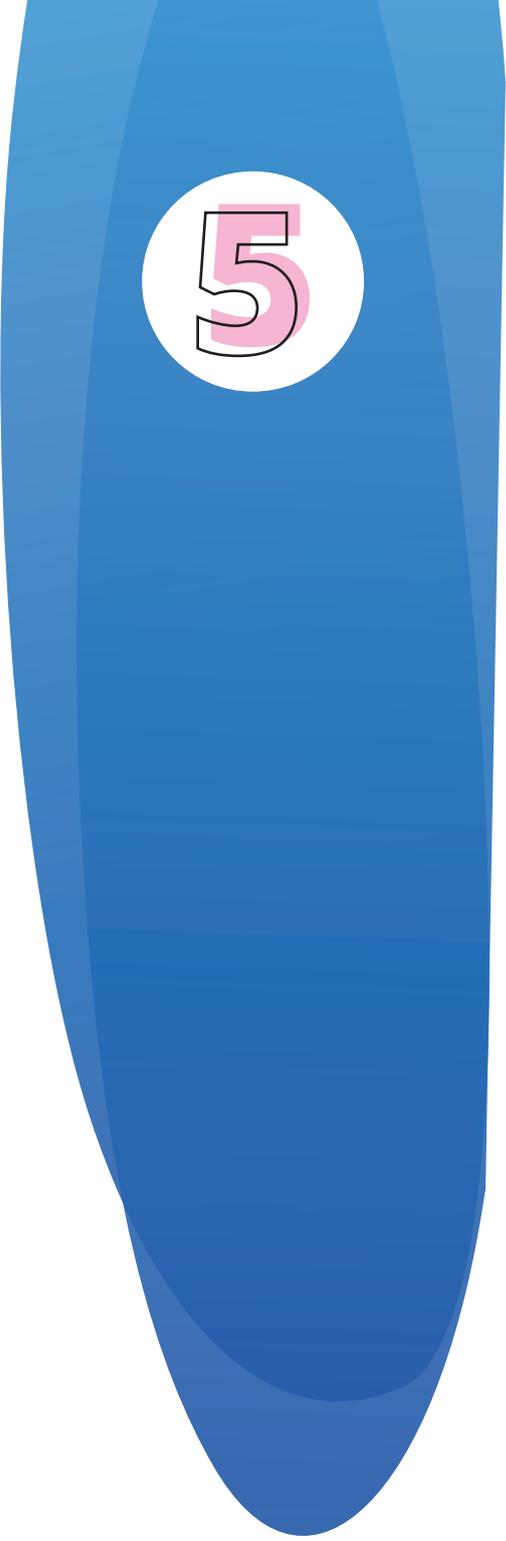
Pembangunan infrastruktur pemeriksaan berkapasitas besar (*high throughput Laboratory*) sebagai ujung tombak pemutusan rantai infeksi (*breaking chain transmission*). Laboratorium berkapasitas besar sangat penting di kota-kota besar (hub) untuk dapat menyajikan data yang mutakhir, cepat, dan akurat berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat (*public health*) dengan dukungan infrastruktur sistem informasi yang baik. Untuk mengefektifkan TLI, pemimpin daerah perlu melaporkan Rasio Lacak Isolasi secara berkala.



REKOMENDASI

AKSELERASI EFEKTIVITAS PENYALURAN STIMULUS FISKAL DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Dalam rangka mengantisipasi sumber kerawanan pangan dari penurunan pendapatan dan kenaikan harga, pemerintah telah mengupayakan langkah stimulus fiskal dengan program perlindungan sosial yang sesuai seperti bantuan paket sembako dan bantuan tunai langsung. Akselerasi terhadap efektivitas penyaluran dan ketepatan waktu menjadi penting untuk diperhatikan untuk menekan peningkatan kerawanan pangan. Antisipasi atas dampak jangka menengah dan panjang jika pandemi memakan waktu lebih dari satu tahun. Perluasan bantuan terhadap kelompok *missing middle* yang rawan untuk tidak mendapatkan akses kesehatan yang layak.



5

REKOMENDASI

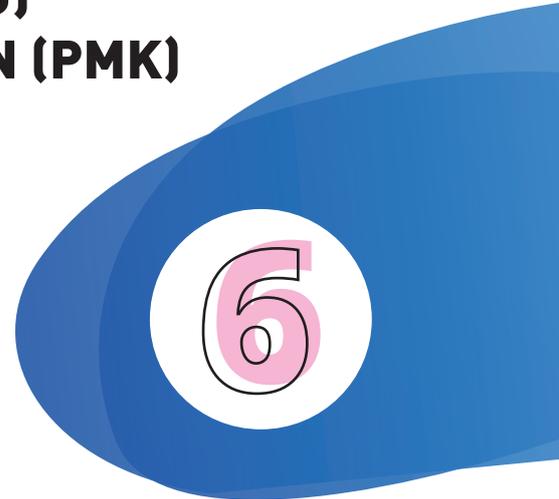
MIND-MAPPING REGULASI UNTUK MENDESAIN KEBIJAKAN PUSAT-DAERAH SERTA PERLUNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)

Desain kebijakan produk hukum pusat-daerah dibuat dengan berbasis pada bukti (*evidence based policy*). Dalam konteks ini PSBB bukan lagi sebuah pilihan (opsional) namun wajib dilakukan pada daerah dengan kasus COVID-19 yang tinggi, artinya berdasarkan pertimbangan utama epidemiologis dan besarnya ancaman terhadap COVID-19. Penegakan hukum perlu ditingkatkan, dengan pemberian sanksi tegas bagi terjadinya pelanggaran.

Mind-mapping dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi dalam mendesain kebijakan pusat-daerah untuk menekan Covid-19, agar memudahkan pengimplementasian kebijakan turunannya. Komite penanganan COVID-19 segera membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), karena kenaikan angka COVID-19 sebagai situasi kegentingan yang memaksa, yang mengatur bagaimana (1) mengendalikan pergerakan masyarakat, (2) mencegah kerumunan masyarakat, (3) menjalankan 3M, dan (4) meningkatkan Tes-Lacak-Isolasi (TLI). Selain itu perlu disusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang realokasi APBN dan APBD untuk percepatan penanganan COVID-19 - sebagai peraturan operasional.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan pada J-PAL dan *Facebook Data for Good* yang sudah berkenan membagikan datanya untuk diolah menjadi dasar pembuatan *policy brief* ini.



REKOMENDASI

MENINGKATKAN PERILAKU DI RUMAH SAJA (STAY AT HOME) DAN MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN 3M

Komite Penanganan COVID-19 dan Kepala Daerah di provinsi dan kabupaten/kota perlu menggalakkan dan mendorong perilaku di rumah saja (*stay at home*) kecuali benar-benar diperlukan, tanpa mengabaikan aspek ekonomi, psikologi, dan sosial. Diperlukan pengaturan untuk mendorong perilaku ini, pada fasilitas umum, transportasi umum, regulasi perkantoran, tempat hiburan, dan kegiatan pendidikan, serta penjaminan ketersediaan jaringan komunikasi dan internet. Dukungan psikososial dan komunikasi risiko perlu diberikan bagi masyarakat untuk dapat menjalankan perilaku di rumah saja.

Komite Penanganan COVID-19 melalui para pemimpin perlu melakukan komunikasi risiko yang baik oleh dengan tetap **menjaga otoritas ilmiah pada ilmuwan**. Pada masyarakat yang heterogen, pesan kunci dalam mengurangi bias optimisme dan mengubah persepsi hambatan dalam menjalankan protokol kesehatan adalah bahwa **siapapun bisa terkena COVID-19** dan mematuhi protokol kesehatan lebih nyaman dari pada sakit karena COVID-19. Diperlukan kampanye bukti sosial, *role model*, dan teladan yang konsisten dari pejabat dan tokoh publik, serta pemanfaatan komunitas.

Untuk memantau kepatuhan masyarakat dalam melakukan 3M diperlukan cara yang terstandardisasi yang salah satunya dapat dilakukan dengan pemantauan yang dilaporkan secara berkala oleh pemerintah daerah. Cara lain adalah dengan melakukan pemantauan berbasis CCTV dengan *artificial intelligence*.



REKOMENDASI

MEMBATASI AKTIVITAS MASYARAKAT DAN PERGERAKAN KE LUAR KOTA

Komite Penanganan COVID-19 dan Kementerian Perhubungan perlu membatasi aktivitas masyarakat dan melakukan pembatasan/pengetatan perjalanan dinas dan bepergian bagi pekerja untuk mengurangi laju *imported case* COVID-19 antar wilayah. Pertemuan secara daring dapat dioptimalkan sebagai pengganti perjalanan dinas sehingga anggaran perjalanan dinas dapat dialokasikan pada bidang lain yang lebih esensial.

Pengendalian pergerakan dan menekan penyebaran infeksi COVID-19 ke sentra-sentra pertanian yang umumnya berada di pedesaan penting untuk diperhatikan dan direncanakan dengan segera. Hal ini untuk mengantisipasi penurunan ketersediaan pangan jangka menengah dan panjang akibat dari penurunan impor pangan dari negara-negara penghasil utama yang juga tengah mengalami gangguan produksi akibat COVID-19.



2

REKOMENDASI

MEMBANGUN SISTEM INFORMASI DAN PUSAT DATA YANG TERKONEKSI, TERINTEGRASI, DAN TERSINKRONISASI

Komite Penanganan COVID-19 perlu segera membangun sistem informasi data dan pusat data yang terkoneksi, terintegrasi, dan tersinkronisasi sebagai dasar akurat untuk membuat kebijakan yang tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Diperlukan unifikasi variabel data yang harus dikumpulkan dengan cara pengumpulan yang seragam. Transparansi data diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kepatuhan. Penyediaan dataset COVID-19 secara terbuka (*open-access*) akan mendorong kolaborasi masyarakat dan mempercepat analisis serta penyelesaian masalah COVID-19. Perlu didirikannya **badan otoritas data kesehatan Indonesia** yang mengatur penyimpanan, kepemilikan, kerahasiaan, akses, lalu lintas dan sharing data kesehatan di negara kita.



REKOMENDASI

MENGEFEKTIFKAN TES-LACAK-ISOLASI

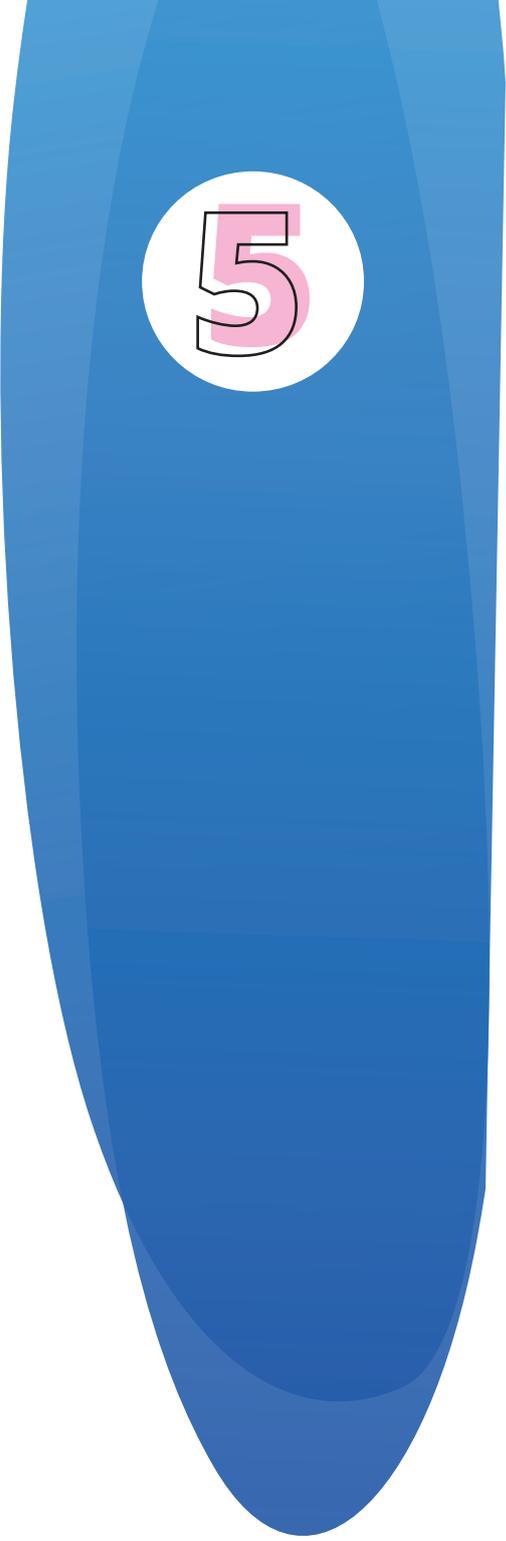
Pembangunan infrastruktur pemeriksaan berkapasitas besar (*high throughput Laboratory*) sebagai ujung tombak pemutusan rantai infeksi (*breaking chain transmission*). Laboratorium berkapasitas besar sangat penting di kota-kota besar (hub) untuk dapat menyajikan data yang mutakhir, cepat, dan akurat berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat (*public health*) dengan dukungan infrastruktur sistem informasi yang baik. Untuk mengefektifkan TLI, pemimpin daerah perlu melaporkan Rasio Lacak Isolasi secara berkala.



REKOMENDASI

AKSELERASI EFEKTIVITAS PENYALURAN STIMULUS FISKAL DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Dalam rangka mengantisipasi sumber kerawanan pangan dari penurunan pendapatan dan kenaikan harga, pemerintah telah mengupayakan langkah stimulus fiskal dengan program perlindungan sosial yang sesuai seperti bantuan paket sembako dan bantuan tunai langsung. Akselerasi terhadap efektivitas penyaluran dan ketepatan waktu menjadi penting untuk diperhatikan untuk menekan peningkatan kerawanan pangan. Antisipasi atas dampak jangka menengah dan panjang jika pandemi memakan waktu lebih dari satu tahun. Perluasan bantuan terhadap kelompok *missing middle* yang rawan untuk tidak mendapatkan akses kesehatan yang layak.



5

REKOMENDASI

MIND-MAPPING REGULASI UNTUK MENDESAIN KEBIJAKAN PUSAT-DAERAH SERTA PERLUNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)

Desain kebijakan produk hukum pusat-daerah dibuat dengan berbasis pada bukti (*evidence based policy*). Dalam konteks ini PSBB bukan lagi sebuah pilihan (opsional) namun wajib dilakukan pada daerah dengan kasus COVID-19 yang tinggi, artinya berdasarkan pertimbangan utama epidemiologis dan besarnya ancaman terhadap COVID-19. Penegakan hukum perlu ditingkatkan, dengan pemberian sanksi tegas bagi terjadinya pelanggaran.

Mind-mapping dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi dalam mendesain kebijakan pusat-daerah untuk menekan Covid-19, agar memudahkan pengimplementasian kebijakan turunannya. Komite penanganan COVID-19 segera membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), karena kenaikan angka COVID-19 sebagai situasi kegentingan yang memaksa, yang mengatur bagaimana (1) mengendalikan pergerakan masyarakat, (2) mencegah kerumunan masyarakat, (3) menjalankan 3M, dan (4) meningkatkan Tes-Lacak-Isolasi (TLI). Selain itu perlu disusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang realokasi APBN dan APBD untuk percepatan penanganan COVID-19 - sebagai peraturan operasional.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan pada J-PAL dan *Facebook Data for Good* yang sudah berkenan membagikan datanya untuk diolah menjadi dasar pembuatan *policy brief* ini.

